

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BELUM TERLAKSANANYA MULTI USAHA KEHUTANAN
PADA PBPH PT. SIKATAN WANA RAYA**

HARIYANTO



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

2026

ABSTRAK

HARIYANTO. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Terlaksananya Multi Usaha Kehutanan Pada PBPH PT. Sikatan Wana Raya. Dibimbing oleh NANANG HANAFAI dan ARDIYANSYAH PURNAMA.

Multi Usaha Kehutanan adalah pendanaan dengan persentase 63,2% dan Indeks Hambatan 36,8%, diikuti oleh sumber daya manusia sebesar 66,8% (Indeks Hambatan 33,2%), dukungan pemerintah sebesar 67,6% (Indeks Hambatan 32,4%), faktor eksternal sebesar 70,0% (Indeks Hambatan 30,0%), manajemen perusahaan sebesar 71,6% (Indeks Hambatan 28,4%), regulasi sebesar 75,2% (Indeks Hambatan 24,8%), dan potensi usaha sebesar 81,2% (Indeks Hambatan 18,8%). Berdasarkan hasil tersebut, aspek pendanaan, sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi belum terlaksananya Multi Usaha Kehutanan pada PBPH PT. Sikatan Wana Raya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah yang lebih optimal untuk mempercepat implementasi Multi Usaha Kehutanan.

Kata kunci: Multi Usaha Kehutanan, PBPH, Pendanaan, Sumber Daya Manusia, Indeks Hambatan.

ABSTRACT

HARIYANTO. *Analysis of the Factors Affecting the Non-Implementation of Multi-Forestry Business at PBPH PT. Sikatan Wana Raya.* Supervised by NANANG HANAFAI and ARDIYANSYAH PURNAMA.

Multi-Forestry Business (MFB) is an approach to optimizing forest utilization through sustainable business diversification. This study aimed to analyze the factors affecting the non-implementation of Multi-Forestry Business at PBPH PT. Sikatan Wana Raya. The study employed a descriptive quantitative method. Data were collected through field observations, questionnaires, interviews, and documentation, and were analyzed descriptively using percentage scores and the Barrier Index.

The results showed that the most influential factor was funding, with a percentage score of 63.2% and a Barrier Index of 36.8%, followed by human resources (66.8%; 33.2%), government support (67.6%; 32.4%), external factors (70.0%; 30.0%), company management (71.6%; 28.4%), regulations (75.2%; 24.8%), and business potential (81.2%; 18.8%). The findings indicate that funding, human resources, and government support are the primary factors hindering the implementation of Multi-Forestry Business at PBPH PT. Sikatan Wana Raya. Therefore, strengthening financial support, improving human resource capacity, and enhancing government assistance are essential to accelerate the implementation of Multi-Forestry Business.

Keywords: Multi-Forestry Business, Forest Utilization Business License (PBPH), Funding, Human Resources, Barrier Index.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BELUM TERLAKSANANYA MULTI USAHA KEHUTANAN
PADA PBPH PT. SIKATAN WANA RAYA**

HARIYANTO

24.61.233457

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada
Program Studi Kehutanan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

2026

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian ini berjudul *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belum Terlaksananya Multi Usaha Kehutanan pada PBPH PT. Sikatan Wana Raya di Kabupaten Gunung Mas.”*

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nanang Hanafi, S.Hut., M.P. selaku Ketua Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan.
2. Bapak Ardiyansyah Purnama, S.Hut., M.Si selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan.
4. Seluruh dosen Program Studi Kehutanan dan Agroteknologi.
5. Staf Tata Usaha Fakultas Pertanian dan Kehutanan.
6. Orang tua dan keluarga.
7. Teman-teman Program Studi Kehutanan Tahun 2025.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga proposal ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kehutanan dan Multi Usaha Kehutanan.

Palangka Raya, Juni 2026

Hariyanto

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Hipotesis	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB II METODE	4
2.1 Waktu dan Tempat	4
2.2 Data dan Peralatan	4
2.3 Tahapan Penelitian	5
2.4 Bagan Alur Penelitian	7
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
2.1 Data Umum perusahaan	8
2.2 Hasil Kuisisioner.....	8
BAB IV PENUTUP	14
2.1 Kesimpulan.....	14
2.1 Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
BIODATA.....	17

DAFTAR TABEL

1. Tutupan Lahan PT. Sikatan Wana Raya	8
2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Terlaksananya Multi Usaha Kehutanan.....	9

DAFTAR GAMBAR

1. Lokasi penelitian	4
2. Bagan Alur Penelitian	7

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuisioner Penelitian	18
2. Bahan Presentasi Potensi Pengembangan Nira (Aren)	23
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pemerintah telah melakukan transformasi kebijakan pengelolaan hutan melalui penerapan Multi Usaha Kehutanan (MUK). Dasar hukum pelaksanaan Multi Usaha Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, khususnya ketentuan mengenai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yang mewajibkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pendekatan Multi Usaha Kehutanan. Ketentuan tersebut hingga kini masih menjadi dasar hukum pelaksanaan MUK.

PT. Sikatan Wana Raya dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kabupaten Gunung Mas yang memiliki potensi sumber daya hutan untuk dikembangkan melalui skema Multi Usaha Kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil pengamatan awal (pra-penelitian) dan informasi dari pihak perusahaan, hingga saat ini implementasi Multi Usaha Kehutanan belum berjalan sebagaimana yang direncanakan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena terdapat perbedaan antara tujuan kebijakan pemerintah yang mendorong diversifikasi usaha kehutanan dengan kondisi nyata di tingkat perusahaan.

Selain itu, Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, serta potensi pemanfaatan kawasan yang cukup besar. Potensi tersebut seharusnya dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengembangkan berbagai bentuk usaha kehutanan sesuai dengan ketentuan Multi Usaha Kehutanan. Namun demikian, belum terlaksananya kebijakan tersebut menunjukkan adanya hambatan yang perlu diidentifikasi secara mendalam agar dapat diketahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasinya.

Dari sisi akademik, penelitian mengenai Multi Usaha Kehutanan di Indonesia masih lebih banyak membahas aspek regulasi, konsep kebijakan, atau peluang pengembangan usaha kehutanan. Penelitian yang secara khusus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya Multi Usaha Kehutanan pada tingkat perusahaan pemegang PBPH, terutama di wilayah Kalimantan Tengah, masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait pemahaman mengenai hambatan implementasi kebijakan Multi Usaha Kehutanan di tingkat operasional perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi belum terlaksananya Multi Usaha Kehutanan pada PBPH PT. Sikatan Wana Raya. Hasil penelitian tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan dan pengelolaan kehutanan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dan pemerintah dalam merumuskan strategi serta kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong implementasi Multi Usaha Kehutanan di masa mendatang.

1.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, belum terlaksananya Multi Usaha Kehutanan pada PBPH PT. Sikatan Wana Raya diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi manajemen perusahaan, sumber daya manusia, pendanaan, dan potensi usaha, sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi, dukungan pemerintah, serta kondisi eksternal di luar perusahaan.

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya Multi Usaha Kehutanan pada perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Sikatan Wana Raya di Kabupaten Gunung Mas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) pada perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi belum terlaksananya MUK. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan pemegang PBPH dalam mengidentifikasi hambatan internal maupun eksternal sehingga dapat menyusun strategi pengembangan usaha yang lebih efektif dan berkelanjutan. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, sedangkan bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat mendorong peningkatan implementasi Multi Usaha Kehutanan yang berdampak pada peningkatan nilai ekonomi kawasan hutan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari.